

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berikut ini merupakan kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian mengenai upaya Pemerintah Kota Magelang dalam melindungi lingkungan hidup pada kasus penurunan kualitas air Sungai Gandekan akibat limbah pabrik CV P, yaitu:

1. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup pada kasus penurunan kualitas air Sungai Gandekan dilakukan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara negosiasi, yang dilakukan atas dasar persetujuan para pihak. Penyelesaian sengketa tersebut dilakukan oleh Pabrik CV P dengan para petani pembudidaya ikan sekitar Sungai Gandekan dengan satu kali pertemuan di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang pada tanggal 22 Juli 2022. Dalam pertemuan tersebut berhasil mencapai kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Sengketa lingkungan hidup pada kasus penurunan kualitas air Sungai Gandekan diselesaikan dengan dilakukan ganti rugi oleh pabrik CV P kepada para petani pembudidaya ikan sejumlah Rp77.235.000 (tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang dalam penyelesaian kasus ini adalah menjadi fasilitator serta pihak penengah antara kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam hal perlindungan lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup sebagai pihak yang berwenang dalam perlindungan dan pengelola lingkungan hidup di Kota Magelang meminta pihak pabrik CV P untuk melakukan tindakan pemulihan terhadap Sungai Gandekan. Tindakan pemulihan dilakukan dengan penebaran cairan eco-enzym serta penebaran bibit ikan di Sungai Gandekan oleh pabrik CV P dan Dinas Lingkungan Hidup.

2. Hambatan-hambatan yang dialami Pemerintah Kota Magelang dalam melakukan penyelesaian sengketa untuk melindungi lingkungan hidup pada kasus penurunan kualitas air Sungai Gandekan, yaitu:

a. Hambatan empiris dalam penyelesaian sengketa

Hambatan yang dialami adalah petugas investigasi dari pengawas mengalami kesulitan dalam menemukan bukti penurunan kualitas air/pencemaran; kesulitan dalam melakukan penghitungan besaran kerugian, terutama pada kerugian-kerugian yang sifatnya intangible atau kerugian tak berwujud; pihak perusahaan atau pihak penanggung jawab usaha/kegiatan juga kurang kooperatif dalam memberikan data-data tambahan yang mana dapat dipergunakan untuk

data pendukung ataupun pengurang ketika menghitung kerugian lingkungan hidup, dan adanya keterbatasan pada data daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, sehingga proses pemulihan yang dilakukan tidak bisa optimal.

b. Hambatan Dinas Lingkungan Hidup

Hambatan yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang adalah terkait efisiensi dan efektivitas waktu karena sengketa lingkungan hidup yang terjadi merupakan lintas sektoral atau lintas batas administrasi; kurangnya jumlah tenaga ahli dalam pelaksanaan verifikasi dan penghitungan kerugian lingkungan hidup serta kurangnya pelatihan penunjang kegiatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup; dan kesulitan dalam menjamin kredibilitas laporan/pengaduan karena pelapor sengketa lingkungan hidup enggan untuk dicatat identitas atau jati dirinya.

**B. Saran**

Merujuk pada kesimpulan di atas, maka saran yang menjadi rekomendasi bagi Pemerintah Daerah Kota Magelang, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, yaitu:

1. Sebaiknya Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang lebih meningkatkan lagi kualitas serta kuantitas sumber daya manusia

terkhusus dalam hal penyelesaian sengketa, misalnya dalam hal penghitungan kerugian dan verifikasi sengketa lingkungan hidup. Dalam hal ini dapat dilakukan pelatihan penunjang kegiatan penyelesaian sengketa seperti dalam hal menjadi fasilitator, mediator, negosiator, penghitung kerugian, dan lain sebagainya.

2. Sebaiknya Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang bisa lebih meningkatkan kinerjanya dengan memanfaatkan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), misalnya dalam hal mencari atau mengumpulkan bukti ketika terjadi pencemaran atau penurunan kualitas air pada sungai. Dalam hal ini dapat digunakan teknologi seperti yang terhubung secara langsung dengan sistem monitoring untuk mendeteksi perubahan kualitas air sungai secara *real-time*. Dengan demikian akan lebih mudah dalam hal menemukan bukti pencemaran atau penurunan kualitas air sungai.